

HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA SEMBULUNG KECAMATAN CLURING KABUPATEN BANYUWANGI

Yessy Agustin Indriya Ningsih, Sri Rahayu, Subur Bahri
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNTAG, Banyuwangi
E-mail: yessyagustin819@yahoo.com

Abstract: *The Relationship of Community Participation In Musrenbangdes Against The Success Of Physical Development of The Village In The Village of Sembulung Sub-District Cluring Banyuwangi.* This event will be based on the research of developmental disabilities that do not comply with the construction in the village of Sembulung Sub-district Cluring Banyuwangi Regency. So these researchers analyzed each of the variables and indicators, community participation in Musrenbangdes (X), Direct Participation (X 1), Indirect Participation (X 2), physical development village (Y). The methods used in this research is quantitative methods. The population in this research is 80 people respondents using product moment later obtained research results X 1 against the Y of 0.550 the figure when compared to the price of a product the moment critique with $N = 80$ of 0.220 exceeds the price of criticism it means H_a H_o accepted and rejected, x 2 against Y of 0.630 the figure when compared to the price of a product the moment critique with $N = 80$ of 0.220 exceeds the price of criticism it means H_a H_o accepted and rejected, and X against Y of 0.318 the figure when compared to the price of a product the moment critique with $N = 80$ of 0.220 exceed price critique means H_a H_o accepted and rejected.

Keywords: *public participation, participation, participation is not direct and physical development of the village.*

Abstrak: Hubungan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes terhadap Keberhasilan Pembangunan Fisik Desa di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilatar belakangi pada pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Sehingga peneliti ini menganalisis masing-masing variabel dan indikator, Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes (X), Partisipasi Langsung (X1), Partisipasi Tidak Langsung (X2), Pembangunan Fisik Desa (Y). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 80 orang responden dengan menggunakan metode product moment kemudian diperoleh hasil penelitian X1 terhadap Y sebesar 0,550 angka tersebut bila dibandingkan dengan harga kritik product moment dengan $N=80$ sebesar 0,220 melebihi harga kritik artinya H_a diterima dan H_o ditolak, X2 terhadap Y sebesar 0,630 angka tersebut bila dibandingkan dengan harga kritik product moment dengan $N=80$ sebesar 0,220 melebihi harga kritik artinya H_a diterima dan H_o ditolak, dan X terhadap Y sebesar 0,318 angka tersebut bila dibandingkan dengan harga kritik product moment dengan $N=80$ sebesar 0,220 melebihi harga harga kritik artinya H_a diterima dan H_o ditolak.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, partisipasi langsung, partisipasi tidak langsung dan pembangunan fisik desa.

Pendahuluan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan setiap tahunnya adalah merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan

tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang menitik beratkan pada pembahasan untuk mensinkronisasikan rencana kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Dengan demikian pemerintah desa memiliki peran dan fungsi yang cukup menentukan bagi keberhasilan menciptakan prasyarat pembangunan desa, harus diperhatikan bahwa pembangunan desa maupun konsepsi pembangunan pada umumnya senantiasa menempatkan masyarakat sebagai pelaku maupun sasaran dari pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya, peran serta, keterlibatan dan partisipasi masyarakat merupakan kunci penentu keberhasilan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tersebut.

Payung hukum untuk pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Muarebang yang diterbitkan setiap tahun. Untuk musrenbang desa, kemudian diterbitkan Pemendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Dalam pelaksanaan kebijakan pasti terdapat kelemahan. Demikian pula pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sembulung Kecamatan Cluring yang diduga terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, sehingga memunculkan masalah yang menghambat

dalam menggapai tujuan dari program ini. Ada beberapa masalah Antara lain masalah dalam hal pembangunan jalan yang belum terselesaikan dan masih banyaknya jalan-jalan yang belum diperbaiki contohnya masih banyaknya jalan berlubang.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan setiap tahunnya adalah merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang menitikberatkan pada pembahasan untuk mengsinkronisasikan rencana kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Dari kebijakan pembangunan masyarakat desa tersebut terlihat betapa partisipasi masyarakat mendapatkan perhatian khusus sebagai modal dan nadi bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian secara teoritis terbukti betapa partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes mempunyai hubungan terhadap keberhasilan pembangunan desa

Tinjauan Pustaka

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes

Menurut Abe (2002: 81) “mengemukakan pengertian partisipasi masyarakat adalah partisipasi yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat”.

Peranan masyarakat dalam partisipasi pembangunan bukan hanya memberikan sesuatu dengan mendukung, membantu tenaga, menyumbang finansial melalui iuran yang bisa diwujudkan dengan konsumsi dan material sesuai dengan sasaran, tetapi juga masyarakat juga subjek yang menerima sesuatu dengan menikmati hasil dari kegiatan suatu pembangunan.

2. Partisipasi Langsung

Partisipasi secara umum merupakan peran serta atau keikutsertaan/keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Partisipasi langsung adalah kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi pemerintah, yang dilakukan sendiri tanpa perantara orang lain.

Conyer (1991 : 45) “menjelaskan bahwa pendekatan dalam partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan”. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal, dikatakan oleh Mikkelsen (1999: 60) “bahwa dibutuhkan pendekatan yang mensinergikan potensi masyarakat. Pendekatan ini memerlukan perencanaan matang yang mendorong peran serta aktif masyarakat”.

Jadi dalam kedua teori ini menyimpulkan bahwa proses pembangunan harus memperoleh hasil yang optimal, serta memerlukan perencanaan matang agar dapat mendorong peran aktif masyarakat. Santoso sastropoetro, (1991 : 71) “ menyatakan bahwa : “sesorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang bersifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaan.”

3. Partisipasi Tidak Langsung

Menurut (Dusseldorp, 1981 : 50) “partisipasi tidak langsung digunakan untuk menggambarkan keikutsertaan seseorang yang mewakili hak partisipasinya (sebagai contoh dalam mengambil keputusan) ke orang lain yang kemudian dapat mewakilinya dalam aktivitas partisipatif pada tingkat yang lebih tinggi”. Menurut Y. Slamet (1994 :39) “partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya”

Dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan seseorang dalam kegiatan partisipatif membuat seseorang mendelegasikan orang lain dalam kegiatan tersebut karena kesibukan setiap individu.

4. Pembangunan Fisik Desa

Menurut Kuncoro (2004:3), pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan di rencanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet alasan panjang dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam pembangunan.

Menurut siagian (2003:4), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik.

Sedangkan menurut Nugroho (2003:24) inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif

Lokasi penelitian di Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. Teknik pemilihan responden yang digunakan adalah teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan.

Hasil Dan Pembahasan

Setelah data-data yang penulis kumpulkan lengkap, maka selanjutnya penulis mengadakan analisis kuantitatif

sering disebut dengan analisis data statistik. Penelitian ini adalah penelitian yang menguji beberapa hipotesis yang sudah diterapkan, di dalam pelaksanaan pengujiannya memerlukan beberapa bahan baku yang berupa data-data yang bersifat primer, data yang bersifat primer ini didasarkan hasil pengisian kuesioner.

Setelah hasil kuesioner diperoleh maka diolah data dan ditabulasi serta di analisis dan slalu berpedoman pad standart pengukuran yang merupakan penerapan dari kerangka operasional yang sudah ditetapkan. karena kerangka operasional yang dimaksud merupakan petunjuk dan pedoman tentang bagaimana cara untuk melakukan pengukuran terhadap variabel penelitian untuk mendapatkan data. Untuk mempermudah pembahasan dan pengolahan terhadap data-data yang dimaksud, peneliti menyederhanakan penyajian data melalui beberapa tabel data hasil pengukuran terhadap indikator-indikator penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan adalah analisis statistik korelasi product moment dan dilanjutkan dengan pengujian statistic regresi sederhana. Secara rinci, hasil pengukuran terhadap variabel beserta indikator-indikatornya dalam penelitian ini disajikan dalam paparan sebagai berikut.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan hasil pengujian sebagaimana yang telah diuraikan dalam analisis data, maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Ada hubungan antara indikator Partisipasi Langsung (X1) terhadap variabel Pembangunan fisik Desa (Y). Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan untuk menguji hubungan antara indikator Partisipasi Langsung (X1) terhadap variabel Pembangunan Fisik Desa (Y) yang menghasilkan angka 0,550 dan ternyata hasil perhitungan ini jika dibandingkan dengan harga kritik product moment untuk $N=80$ dengan taraf signifikansi 95% sebesar 0,220, melebihi harga kritik yang dimaksud.

Dengan demikian maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Ada hubungan antara indikator Partisipasi tidak Langsung (X2) terhadap variabel Pembangunan fisik Desa (Y). Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan untuk menguji hubungan antara indikator Partisipasi tidak Langsung (X2) terhadap variabel Pembangunan Fisik Desa (Y) yang menghasilkan angka 0,630 dan ternyata hasil perhitungan ini jika dibandingkan dengan harga kritik product moment untuk $N=80$ dengan taraf signifikansi 95% sebesar 0,220, melebihi harga kritik yang dimaksud. Dengan demikian maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Ada hubungan antara variabel partisipasi masyarakat (X) terhadap variabel Pembangunan fisik Desa (Y). Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan untuk menguji hubungan antara indikator Partisipasi Masyarakat (X) terhadap variabel Pembangunan Fisik Desa (Y) yang menghasilkan angka 0,318 dan ternyata hasil perhitungan ini jika dibandingkan dengan harga kritik product moment untuk $N=80$ dengan taraf signifikansi 95% sebesar 0,220, melebihi harga kritik yang dimaksud. Dengan demikian maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

Berdasarkan analisa hasil penelitian masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai Musrenbangdes, oleh karena itu perlu adanya pengembangan penelitian tentang musrenbangdes di desa secara lebih mendalam.

Masyarakat harus menyadari akan pentingnya berpartisipasi dan menjalin komunikasi serta bekerja sama dengan baik masyarakat lain maupun dengan pemerintah desa setempat dalam merumuskan dan menjalankan program-program pembangunan desa apa yang akan dilaksanakan ke depannya sehingga dapat membangun desa dengan baik dengan tujuan kesejahteraan bersama.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program-program pembangunan yang sejalan dengan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan berjalan dengan baik apabila

pemerintah melibatkan masyarakat sepenuhnya di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, A. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukatif.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ke tiga*. Gadjah Mada University Press.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, J. S. (2003). *Pelaku Konsumen (Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran)*. Yogyakarta: Andi.
- Sastropoetro, S. (1988). *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Khalayak dalam Komunikasi Sosial*. *Remaja rosda karya*, 60.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori dan Praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka cipta.
- Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*. Surakarta: Sebelas Maret University.